Mesada: Journal of Innovative Research
Volume 03, Nomor 02, Tahun 2026, h. 1118-1130
https://ziaresearch.or.id/index.php/mesada
e-ISSN: 3064-3864

Efektivitas Sosialisasi Pendidikan Politik: Kesadaran dan Partisipasi Warga Desa Mekarsari

Fikri Dwi Septiyan[1], Abu Syahrin[2], Endang Ekowati[3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: sfikridwi@gmail.com

ABSTRACT
Political education outreach is an important means of strengthening citizens' understanding of political rights and encouraging democratic engagement. However, greater political knowledge does not necessarily translate into equal participation, particularly in village communities. This study examines the factors shaping the effectiveness of political education outreach, its implementation and the roles of involved actors, and its relationship with political awareness and participation in Mekarsari Village, Delitua District, Deli Serdang Regency, Indonesia. Using a descriptive qualitative design informed by political sociology, the study collected data through observation, in-depth interviews with five purposively selected informants, and document review. Findings were analyzed thematically with reference to political socialization theory, the Civic Voluntarism Model, and the concepts of political knowledge and efficacy. The findings indicate that outreach is more readily accepted when materials reflect local concerns, participatory discussions and voting simulations are used, and trusted community figures are involved. Election organizers and supervisors, village officials, and local leaders participate in implementation, but activities tend to concentrate around election periods and face budget, staffing, and accessibility constraints. According to informants' accounts and observations, outreach is associated with better understanding of voting procedures, political rights, money politics, and the critical evaluation of candidates. Nevertheless, participation in community decision-making forums remains concentrated among certain groups, while some citizens participate only under particular conditions. The study concludes that effectiveness in building awareness must be distinguished from equity in political participation. Sustained and inclusive political education is therefore needed to extend opportunities for meaningful engagement beyond the election cycle.
Keywords: *Mekarsari Village; Political Awareness; Political Education; Political Participation; Socialization Effectiveness.*

ABSTRAK
Sosialisasi pendidikan politik merupakan sarana penting untuk membangun pemahaman warga terhadap hak politik dan mendorong keterlibatan dalam kehidupan demokrasi. Namun, peningkatan pengetahuan politik belum tentu diikuti oleh partisipasi yang merata, terutama pada masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang memengaruhi efektivitas sosialisasi pendidikan politik, proses pelaksanaan serta peran aktor yang terlibat, dan keterkaitannya dengan kesadaran serta partisipasi politik masyarakat Desa Mekarsari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif sosiologi politik. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam terhadap lima informan yang dipilih secara purposif, dan penelaahan dokumen. Data dianalisis melalui pengelompokan tema temuan dengan mempertimbangkan teori sosialisasi politik, Civic Voluntarism Model, serta konsep pengetahuan dan efikasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan terhadap materi sosialisasi dipengaruhi oleh

kesesuaiannya dengan kebutuhan lokal, metode diskusi dan simulasi, serta kepercayaan terhadap tokoh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan melibatkan penyelenggara dan pengawas pemilu, pemerintah desa, serta tokoh lokal, tetapi cenderung terkonsentrasi menjelang pemilu dan menghadapi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan jangkauan. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan informan, sosialisasi berkaitan dengan meningkatnya pemahaman mengenai prosedur pemilu, hak memilih, bahaya politik uang, dan penilaian kritis terhadap calon. Akan tetapi, partisipasi dalam forum pengambilan keputusan masih didominasi kelompok tertentu, sementara keterlibatan sebagian warga tetap bersyarat. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pada aspek kesadaran perlu dibedakan dari pemerataan partisipasi. Pendidikan politik yang berkelanjutan dan inklusif diperlukan agar pengetahuan politik dapat diikuti oleh kesempatan berpartisipasi yang lebih luas. Implikasinya, pelaksana perlu menyusun kegiatan yang relevan dengan kebutuhan warga serta memberi perhatian kepada perempuan dan kelompok lanjut usia.
Kata Kunci: Desa Mekarsari; Efektivitas Sosialisasi; Kesadaran Politik; Partisipasi Politik; Pendidikan Politik.

PENDAHULUAN

Demokrasi menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang representatif dan bertanggung jawab. Partisipasi politik tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum, tetapi juga melalui keterlibatan warga dalam menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, dan memengaruhi pengambilan keputusan publik. Dalam perspektif demokrasi partisipatoris, keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari proses pembelajaran demokrasi yang memungkinkan warga mengembangkan pemahaman serta kemampuan untuk memengaruhi kehidupan politik (Pateman, 1970). Namun, kualitas partisipasi politik tidak selalu sejalan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam pemilihan umum. Keterlibatan yang bersifat prosedural belum tentu mencerminkan kesadaran politik yang kritis, terutama ketika masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses informasi dan ruang partisipasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan politik sebagai sarana membangun pemahaman warga mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam kehidupan demokrasi.

Pendidikan politik merupakan proses pembentukan pengetahuan, nilai, sikap, dan orientasi politik yang memungkinkan masyarakat memahami sistem pemerintahan serta berpartisipasi secara sadar dalam proses politik. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami prosedur pemilihan, tetapi juga mampu mengevaluasi calon pemimpin, mengenali praktik politik uang, dan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Pendidikan politik yang dilaksanakan melalui pendekatan komunikatif dan partisipatif dapat memperluas pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan politik (Khusnia dkk., 2024). Meskipun demikian, keberhasilan sosialisasi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan terlaksananya kegiatan atau jumlah peserta yang hadir. Efektivitasnya juga perlu diperhatikan melalui pemahaman masyarakat terhadap materi, relevansi metode penyampaian, dan keterkaitan kegiatan tersebut dengan kesadaran serta bentuk partisipasi politik warga.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, pendidikan politik menghadapi tantangan yang berkaitan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Hubungan sosial yang erat, pengaruh tokoh masyarakat, serta perbedaan akses terhadap pendidikan dan informasi dapat membentuk cara warga memahami pesan-pesan politik. Penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat

Desa Mekar Jaya menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam pemilihan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman politik serta kondisi sosial ekonomi masyarakat (Haryani & Hadi, 2021). Sementara itu, kajian mengenai demokrasi desa di Indonesia menunjukkan bahwa dominasi elite dan keterbatasan partisipasi warga masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi pada tingkat lokal (Hakim dkk., 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan politik di pedesaan perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar kegiatan sosialisasi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga membuka ruang keterlibatan yang lebih bermakna.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik dan kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Penelitian di Desa Teniga, Lombok Utara, menunjukkan bahwa kolaborasi dengan penyelenggara pemilu melalui sosialisasi dan diskusi dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik (Khusnia dkk., 2024)s. Penelitian lainnya di Kabupaten Sidoarjo mengkaji efektivitas sosialisasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dengan menitikberatkan pada capaian kegiatan dan peningkatan partisipasi pemilih (Afika dkk., 2024). Dalam konteks Sumatera Utara, pelaksanaan pendidikan politik berbasis digital melalui program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan pentingnya pendampingan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat pemahaman politik masyarakat (Kusmanto dkk., 2023). Berbagai kajian tersebut memperlihatkan bahwa sosialisasi pendidikan politik dapat berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat, meskipun pelaksanaannya memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kondisi wilayah penelitian.

Meskipun demikian, kajian terdahulu tersebut belum secara khusus menjelaskan pengalaman masyarakat Desa Mekarsari dalam menerima, memahami, dan merespons sosialisasi pendidikan politik. Penelitian yang menitikberatkan pada pelaksanaan program maupun capaian partisipasi pemilih belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana interaksi antara materi sosialisasi, metode penyampaian, peran aktor lokal, dan kondisi sosial masyarakat membentuk kesadaran politik. Selain itu, peningkatan pengetahuan politik tidak selalu dapat diartikan sebagai peningkatan partisipasi secara langsung, sebab keterlibatan masyarakat juga berkaitan dengan motivasi, kesempatan, dan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, diperlukan kajian yang tidak hanya mendeskripsikan kegiatan sosialisasi, tetapi juga memahami keterkaitan antara proses pendidikan politik, kesadaran warga, dan bentuk partisipasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat desa.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori sosialisasi politik dan *Civic Voluntarism Model* dengan mempertimbangkan konsep *political knowledge* dan *political efficacy*. Teori sosialisasi politik digunakan untuk memahami proses penyampaian serta pembentukan pengetahuan, nilai, dan orientasi politik masyarakat melalui interaksi dengan berbagai aktor sosial. Sementara itu, *Civic Voluntarism Model* menjelaskan bahwa partisipasi politik berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, keterlibatan psikologis, dan proses rekrutmen melalui jejaring sosial (Alscher dkk., 2026). Dalam kerangka tersebut, pengetahuan politik menjadi salah satu sumber daya yang membantu masyarakat memahami persoalan publik, sedangkan efikasi politik berkaitan dengan keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk berpartisipasi dalam proses politik. Integrasi kedua perspektif ini memungkinkan analisis mengenai

mengapa kegiatan sosialisasi yang memperluas pengetahuan politik belum tentu menghasilkan keterlibatan masyarakat yang konsisten dan merata.

Desa Mekarsari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, menjadi lokasi penelitian untuk memahami dinamika tersebut dalam konteks kehidupan politik masyarakat desa. Sosialisasi pendidikan politik di wilayah ini melibatkan berbagai aktor, antara lain penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Keberadaan aktor-aktor tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan politik berlangsung melalui interaksi antara lembaga formal dan lingkungan sosial masyarakat. Namun, keterlibatan berbagai pihak belum dapat dijadikan ukuran tunggal keberhasilan program. Efektivitas sosialisasi perlu dipahami dengan memperhatikan kesesuaian materi, metode penyampaian, kontinuitas pelaksanaan, serta pengalaman masyarakat dalam mengembangkan kesadaran dan partisipasi politik. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan perspektif aktor pelaksana dan penerima sosialisasi sebagai dasar untuk memahami dinamika pendidikan politik secara kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sosialisasi pendidikan politik, mengkaji proses pelaksanaan beserta peran aktor yang terlibat, serta menjelaskan keterkaitannya dengan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Desa Mekarsari. Penelitian ini menawarkan sudut pandang analitis dengan membedakan efektivitas sosialisasi dalam membangun kesadaran politik dan efektivitasnya dalam mendorong partisipasi yang lebih merata. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian diarahkan untuk memahami pengalaman dan persepsi informan terhadap proses sosialisasi serta hambatan yang menyertai keterlibatan politik masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian pendidikan politik di tingkat lokal sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara pemilu, pemerintah desa, dan aktor masyarakat dalam merancang pendidikan politik yang berkelanjutan, kontekstual, dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan sosiologi politik. Pendekatan ini digunakan untuk memahami efektivitas sosialisasi pendidikan politik melalui pengalaman, persepsi, dan interaksi sosial masyarakat dalam membentuk kesadaran serta partisipasi politik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengkaji fenomena sosial secara mendalam dengan memperhatikan konteks dan karakteristik subjek penelitian tanpa melakukan manipulasi terhadap kondisi yang diamati (Syahrizal & Jailani, 2023). Penelitian dilaksanakan di Desa Mekarsari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengumpulan data melalui wawancara berlangsung pada 25 Juli hingga 3 Agustus 2026. Lokasi tersebut menjadi fokus penelitian untuk mengkaji pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik, peran aktor yang terlibat, serta keterkaitannya dengan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.

Subjek penelitian terdiri atas lima informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan mereka mengenai pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik. Kelima informan meliputi sekretaris desa (IN-01), anggota Panitia Pemungutan Suara/PPS (IN-02), anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan/Panwascam (IN-03), tokoh masyarakat (IN-04),

dan masyarakat penerima sosialisasi (IN-05). Pemilihan informan dari latar belakang yang berbeda bertujuan memperoleh perspektif dari pihak penyelenggara, fasilitator, pengawas, dan penerima kegiatan sosialisasi. Teknik pemilihan secara purposif digunakan agar informasi yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian serta mampu menggambarkan dinamika fenomena yang dikaji (Boestam dkk., 2023).

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan mengenai pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik, metode penyampaian materi, kendala kegiatan, serta pengalaman masyarakat dalam memahami dan menjalankan hak politiknya. Data pendukung diperoleh melalui dokumen terkait penyelenggaraan pemilu dan sosialisasi politik, buku, artikel jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data tersebut diarahkan untuk memperoleh pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sosialisasi, hubungan antaraktor pelaksana, dan keterkaitan sosialisasi dengan kesadaran serta partisipasi politik masyarakat.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui penelaahan hasil wawancara dan pengamatan, pengelompokan informasi berdasarkan kesamaan makna, serta penyusunan kode, kategori, dan tema penelitian. Proses tersebut menghasilkan tiga kelompok analisis utama, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sosialisasi pendidikan politik, proses pelaksanaan dan peran aktor, serta keterkaitan sosialisasi dengan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Pengelompokan data ke dalam tema memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola dan hubungan antartemuan secara sistematis (Naeem dkk., 2023). Interpretasi hasil dilakukan dengan menggunakan teori sosialisasi politik, *Civic Voluntarism Model*, serta konsep *political knowledge* dan *political efficacy*. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan sumber terkait, serta triangulasi metode dengan menelaah kesesuaian hasil wawancara dan dokumentasi. Melalui prosedur tersebut, penelitian berupaya menghasilkan pemahaman yang kontekstual mengenai efektivitas sosialisasi pendidikan politik tanpa mengklaim adanya hubungan sebab-akibat yang terukur secara statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keragaman Makna Qaul dalam Al-Qur'an

Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Sosialisasi Pendidikan Politik

Efektivitas sosialisasi pendidikan politik di Desa Mekarsari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, dipengaruhi oleh interaksi antara kualitas pelaksanaan program dan kondisi sosial politik masyarakat. Berdasarkan analisis wawancara terhadap lima informan, ditemukan empat faktor utama yang berkaitan dengan efektivitas kegiatan, yaitu relevansi materi sosialisasi, metode penyampaian, keterbatasan sumber daya, serta budaya politik masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal yang berkaitan dengan desain dan pelaksanaan kegiatan serta faktor eksternal yang mencerminkan kondisi sosial masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sosialisasi tidak cukup dipahami melalui penyampaian informasi politik, tetapi juga melalui kemampuan program menjangkau dan membangun pemahaman masyarakat sesuai dengan karakteristik lingkungan sosialnya.

Faktor pertama berkaitan dengan relevansi materi pendidikan politik terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian materi dengan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dinilai lebih mudah dipahami oleh warga. Sekretaris Desa Mekarsari menjelaskan bahwa "Materi yang sederhana, menggunakan bahasa lokal, dan dikemas dalam bentuk diskusi interaktif atau simulasi lebih mudah diterima. Warga lebih responsif jika ada contoh konkret dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari" (IN-01, Sekretaris Desa, komunikasi pribadi, 25 Juli 2026). Pernyataan tersebut diperkuat oleh anggota Panitia Pemungutan Suara yang menjelaskan bahwa materi sosialisasi yang berasal dari KPU pusat disesuaikan oleh pelaksana di tingkat lokal melalui penggunaan bahasa, contoh kasus, dan isu yang relevan dengan masyarakat desa (IN-02, Panitia PPS, komunikasi pribadi, 27 Juli 2026). Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian materi agar pesan pendidikan politik tidak berhenti sebagai informasi formal, melainkan dapat dipahami berdasarkan pengalaman sosial masyarakat.

Faktor kedua adalah penggunaan metode sosialisasi yang bersifat partisipatif. Kegiatan pendidikan politik di Desa Mekarsari dilaksanakan melalui ceramah singkat, diskusi kelompok, simulasi pencoblosan, dan penggunaan media poster. Berdasarkan pengalaman penyelenggara, diskusi dan simulasi dianggap lebih efektif dibandingkan penyampaian informasi satu arah karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan memahami prosedur pemilihan secara langsung. Anggota PPS menyatakan bahwa "Diskusi kelompok dan simulasi paling efektif karena interaktif dan praktis" (IN-02, Panitia PPS, komunikasi pribadi, 27 Juli 2026). Sementara itu, anggota Panwascam mengamati adanya perubahan dalam respons politik sebagian warga setelah mengikuti sosialisasi, terutama ketika mereka mulai mempertanyakan rekam jejak calon dan relevansi program yang ditawarkan (IN-03, Anggota Panwascam, komunikasi pribadi, 28 Juli 2026). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menempatkan pendekatan partisipatif sebagai strategi penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat (Nuryana dkk., 2025). Dengan demikian, metode sosialisasi yang memungkinkan interaksi dua arah berpotensi mendorong pembentukan kesadaran politik yang lebih kritis.

Meskipun demikian, pelaksanaan sosialisasi masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Sekretaris desa mengidentifikasi keterbatasan anggaran operasional, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta sikap apatis sebagian masyarakat sebagai hambatan utama (IN-01, Sekretaris Desa, komunikasi pribadi, 25 Juli 2026). Sementara itu, anggota PPS menyoroti penyebaran penduduk yang tidak merata dan perbedaan tingkat pendidikan sebagai persoalan yang memengaruhi jangkauan serta penerimaan materi sosialisasi (IN-02, Panitia PPS, komunikasi pribadi, 27 Juli 2026). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kegiatan tidak hanya bergantung pada kemampuan penyelenggara dalam menyampaikan materi, tetapi juga pada ketersediaan dukungan kelembagaan dan aksesibilitas masyarakat. Keterbatasan sumber daya dapat mengurangi intensitas kegiatan, sedangkan perbedaan latar belakang pendidikan memerlukan strategi komunikasi yang lebih beragam agar materi dapat dipahami oleh kelompok masyarakat yang berbeda.

Selain persoalan struktural, budaya politik lokal turut memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi. Tokoh masyarakat menjelaskan bahwa warga cenderung lebih mempercayai tokoh lokal karena memiliki kedekatan

sosial dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat. Namun, informasi dari lembaga resmi tetap diperlukan untuk menjamin ketepatan materi yang disampaikan (IN-04, Tokoh Masyarakat, komunikasi pribadi, 1 Agustus 2026). Di sisi lain, anggota Panwascam mengungkapkan adanya indikasi praktik politik uang dalam lingkup terbatas, terutama menjelang pemilihan kepala daerah, yang dinilai dapat mengalihkan perhatian sebagian warga dari substansi pendidikan politik menuju pertimbangan keuntungan material (IN-03, Anggota Panwascam, komunikasi pribadi, 28 Juli 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan kepercayaan sosial dapat menjadi pendukung sosialisasi, tetapi praktik politik transaksional berpotensi melemahkan orientasi masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi.

Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas sosialisasi pendidikan politik merupakan hasil interaksi antara desain program dan kondisi sosial masyarakat. Penelitian terdahulu mengenai pendidikan politik berbasis digital melalui program Desa Peduli Pemilu di Kabupaten Deli Serdang juga menempatkan penguatan literasi politik dan pemanfaatan saluran komunikasi sebagai bagian penting dari pendidikan masyarakat (Kusmanto dkk., 2023). Dalam konteks Desa Mekarsari, penyesuaian materi dan metode perlu disertai dengan keterlibatan tokoh masyarakat serta penguatan pengawasan partisipatif terhadap praktik politik uang. Dengan demikian, efektivitas sosialisasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang disampaikan, tetapi juga oleh relevansi pesan, kepercayaan terhadap penyampai informasi, dan kemampuan program menghadapi hambatan sosial yang memengaruhi orientasi politik warga.

Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Politik dan Peran Aktor Lokal

Pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik di Desa Mekarsari melibatkan berbagai aktor yang memiliki fungsi dan tanggung jawab berbeda. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan sosialisasi telah berlangsung sejak tahun 2019 dan semakin intensif menjelang penyelenggaraan pemilihan umum (IN-01, Sekretaris Desa, komunikasi pribadi, 25 Juli 2026). Aktor yang terlibat meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang, unsur pengawas pemilu di Kecamatan Delitua, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi pemuda (IN-01, Sekretaris Desa, komunikasi pribadi, 25 Juli 2026). Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik di tingkat desa tidak diselenggarakan oleh satu institusi, melainkan melalui kerja sama antara lembaga penyelenggara pemilu dan aktor sosial yang memiliki kedekatan dengan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggara pemilu berperan menyediakan substansi pendidikan politik, sedangkan pelaksana teknis di tingkat kecamatan dan desa membantu penyampaian materi kepada masyarakat. Pemerintah desa menjalankan fungsi fasilitasi dengan menyediakan tempat kegiatan, menyampaikan informasi melalui perangkat desa, mengoordinasikan kehadiran masyarakat, serta mendukung ketertiban pelaksanaan program. Pemerintah desa juga berperan sebagai penghubung antara penyelenggara sosialisasi dan masyarakat, terutama melalui koordinasi dengan perangkat kewilayahan dan tokoh lokal (IN-01, Sekretaris Desa, komunikasi pribadi, 25 Juli 2026). Pembagian peran tersebut memperlihatkan pentingnya dukungan kelembagaan dalam memastikan kegiatan pendidikan politik dapat dilaksanakan dan menjangkau masyarakat sasaran.

Program pendidikan politik yang pernah dilaksanakan mencakup KPU Saba Desa, sosialisasi pemilih pemula, dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Materi kegiatan meliputi prosedur penggunaan hak pilih, pengenalan tahapan pemilu, serta pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam proses demokrasi (IN-02, Panitia PPS, komunikasi pribadi, 27 Juli 2026). Dari sisi pengawasan, unsur Panwascam juga berperan dalam memberikan pemahaman mengenai pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran pemilu, dan bahaya politik uang. Meskipun kegiatan melibatkan berbagai aktor, pelaksanaannya masih menunjukkan ketergantungan terhadap momentum elektoral. Berdasarkan keterangan informan, jadwal sosialisasi "biasanya intensif 3–6 bulan sebelum pemilu atau pilkada" (IN-02, Panitia PPS, komunikasi pribadi, 27 Juli 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan pemilih berkelanjutan dan intensitas pelaksanaan kegiatan yang cenderung meningkat pada periode menjelang pemilihan.

Kecenderungan tersebut menjadi tantangan karena pendidikan politik pada dasarnya membutuhkan proses pembelajaran yang berlangsung secara berkesinambungan. Sosialisasi yang terkonsentrasi menjelang pemilu berpotensi lebih menekankan pemahaman prosedural daripada penguatan kesadaran politik jangka panjang. Berdasarkan hasil wawancara, diperlukan pelibatan tokoh lokal, penggunaan media komunikasi yang mudah diakses, serta pelaksanaan sosialisasi di luar periode pemilu (IN-03, Anggota Panwascam, komunikasi pribadi, 28 Juli 2026). Penilaian ini sejalan dengan penelitian terdahulu mengenai pentingnya optimalisasi pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pilkada (Sutanto dkk., 2025). Dalam konteks Desa Mekarsari, keberlanjutan program menjadi persoalan penting karena kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan politik tidak seharusnya terbatas pada momentum penggunaan hak pilih.

Tokoh masyarakat juga memiliki peran strategis sebagai penghubung antara lembaga formal dan masyarakat desa. Keterlibatan tokoh lokal dilakukan melalui penyebaran undangan, pendampingan narasumber, dan fasilitasi diskusi pada tingkat dusun (IN-04, Tokoh Masyarakat, komunikasi pribadi, 1 Agustus 2026). Kedekatan sosial membuat tokoh masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk membangun komunikasi dengan warga yang belum terbiasa mengikuti kegiatan politik formal. Peran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi tidak hanya ditentukan oleh legitimasi kelembagaan penyelenggara, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang menyampaikan pesan. Temuan ini memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya yang membahas penguatan pendidikan politik masyarakat melalui program berbasis komunitas dan pemanfaatan media digital di Kabupaten Deli Serdang (Kusmanto dkk., 2023).

Aspek lain yang ditemukan berkaitan dengan mekanisme evaluasi kegiatan. Keberhasilan sosialisasi dinilai melalui jumlah pemilih terdaftar, tingkat kehadiran masyarakat di tempat pemungutan suara, serta tanggapan warga melalui kuesioner atau diskusi setelah kegiatan (IN-02, Panitia PPS, komunikasi pribadi, 27 Juli 2026). Indikator tersebut memberikan gambaran mengenai capaian administratif dan respons peserta, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan perubahan pemahaman serta kualitas keterlibatan politik masyarakat. Oleh sebab itu, evaluasi program perlu mempertimbangkan aspek pengetahuan, sikap kritis, dan keterlibatan warga dalam kegiatan demokrasi di luar pemilihan umum.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pendidikan politik di Desa Mekarsari menunjukkan adanya pembagian peran antara lembaga penyelenggara, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Namun, kesinambungan program masih menjadi tantangan karena pelaksanaannya cenderung mengikuti siklus pemilu. Temuan ini menegaskan perlunya mengembangkan pola pendidikan politik berbasis komunitas yang dapat berlangsung secara berkala melalui diskusi warga, forum desa, serta saluran komunikasi lokal seperti grup WhatsApp dan radio desa. Dengan demikian, pendidikan politik dapat berkembang dari kegiatan sosialisasi yang bersifat periodik menjadi proses pembelajaran demokrasi yang lebih berkelanjutan.

Kesadaran Politik dan Kesenjangan Partisipasi Masyarakat Desa Mekarsari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pendidikan politik berkaitan dengan penguatan pemahaman dan sikap kritis masyarakat Desa Mekarsari, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh keterlibatan politik yang konsisten dan merata. Berdasarkan wawancara dengan unsur pemerintah desa, pengawas pemilu, tokoh masyarakat, dan penerima sosialisasi, terdapat indikasi peningkatan pemahaman mengenai hak memilih, prosedur pemilu, serta pentingnya menilai calon pemimpin secara rasional. Namun, pengalaman informan juga memperlihatkan adanya hambatan sosial dan perbedaan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan politik desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran politik dan partisipasi politik merupakan dua dimensi yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu berkembang secara bersamaan.

Penguatan kesadaran politik terutama terlihat dari pemahaman masyarakat mengenai prosedur pemilihan dan kemampuan mengevaluasi informasi politik. Berdasarkan pengamatan sekretaris desa, setelah kegiatan sosialisasi sebagian warga mulai mempertanyakan visi dan misi calon, lebih kritis terhadap janji kampanye, serta tidak mudah menerima informasi politik yang belum terverifikasi (IN-01, Sekretaris Desa, komunikasi pribadi, 25 Juli 2026). Pengamatan tersebut diperkuat oleh anggota Panwascam yang menyatakan bahwa setelah sosialisasi muncul pertanyaan kritis mengenai rekam jejak calon dan relevansi program yang ditawarkan (IN-03, Anggota Panwascam, komunikasi pribadi, 28 Juli 2026). Sementara itu, seorang warga penerima sosialisasi menyampaikan bahwa materi yang paling diingat berkaitan dengan "cara mencoblos yang benar, pentingnya memilih berdasarkan visi-misi, dan larangan politik uang" (IN-05, Masyarakat, komunikasi pribadi, 3 Agustus 2026). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pendidikan politik tidak hanya memberikan informasi teknis mengenai pemilihan, tetapi juga berpotensi memperkuat pertimbangan warga dalam menentukan pilihan politik.

Selain memperluas pemahaman prosedural, sosialisasi juga berkaitan dengan terbentuknya kesadaran mengenai hak dan tanggung jawab politik. Berdasarkan pengalaman penerima sosialisasi, kegiatan pendidikan politik memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai arti penting hak pilih dan hubungannya dengan arah pembangunan desa. Informan menyatakan, "Ya, sekarang lebih sadar bahwa memilih adalah hak dan kewajiban, serta suara saya bisa mengubah arah pembangunan desa" (IN-05, Masyarakat, komunikasi pribadi, 3 Agustus 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan adanya keyakinan individu bahwa keterlibatannya dalam pemilihan memiliki arti bagi kehidupan bersama. Dalam perspektif *political efficacy*, keyakinan terhadap kemampuan diri untuk berpartisipasi merupakan bagian

penting dari keterlibatan politik. Hal ini memiliki relevansi dengan kajian yang menggunakan *Civic Voluntarism Model* untuk menjelaskan keterkaitan sumber daya, keterlibatan psikologis, dan dukungan sosial dengan kesediaan individu berpartisipasi dalam kegiatan politik (Alscher dkk., 2026).

Meskipun demikian, peningkatan pemahaman politik tidak secara otomatis menghasilkan partisipasi yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara, keputusan masyarakat untuk menggunakan hak pilih atau mengikuti musyawarah desa masih dipengaruhi oleh kualitas calon, kejujuran proses pemilihan, serta relevansi persoalan yang dibahas dengan kebutuhan masyarakat. Informan tersebut menyatakan bahwa dirinya akan "Datang ke TPS jika yakin calonnya berkualitas dan prosesnya jujur. Terlibat musyawarah jika topik relevan dengan kebutuhan sehari-hari" (IN-05, Masyarakat, komunikasi pribadi, 3 Agustus 2026). Temuan ini menunjukkan adanya pola partisipasi bersyarat, ketika keterlibatan politik ditentukan oleh penilaian individu terhadap manfaat, kredibilitas, dan relevansi proses politik. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan politik perlu dibedakan dari keterlibatan aktual karena keputusan berpartisipasi juga berkaitan dengan motivasi dan kesempatan yang dimiliki masyarakat.

Kesenjangan partisipasi juga terlihat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, forum warga, dan kegiatan diskusi, tetapi partisipasi dalam forum tersebut masih didominasi tokoh masyarakat dan kelompok pemuda yang aktif (IN-01, Sekretaris Desa, komunikasi pribadi, 25 Juli 2026). Pernyataan tersebut diperkuat oleh tokoh masyarakat yang menjelaskan bahwa keterlibatan warga relatif tinggi pada kegiatan gotong royong fisik, sedangkan musyawarah mengenai kebijakan dan pembangunan desa lebih banyak diikuti oleh tokoh masyarakat serta perangkat desa. Selain itu, kegiatan sosialisasi dinilai perlu menjangkau kelompok yang lebih luas, termasuk perempuan dan masyarakat lanjut usia (IN-04, Tokoh Masyarakat, komunikasi pribadi, 1 Agustus 2026). Temuan tersebut mengindikasikan adanya perbedaan kesempatan dan keterlibatan dalam ruang pengambilan keputusan, meskipun belum cukup untuk mengukur kesenjangan partisipasi berdasarkan kategori sosial secara menyeluruh.

Hambatan partisipasi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap kegiatan sosialisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman dan penilaian masyarakat terhadap proses politik. Berdasarkan pengamatan tokoh masyarakat, kekecewaan terhadap hasil pemilu sebelumnya, kesibukan ekonomi, dan persepsi bahwa kegiatan politik tidak membawa perubahan nyata menjadi alasan sebagian masyarakat enggan terlibat secara aktif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat yang telah memahami hak politiknya belum tentu memiliki kesempatan, motivasi, atau keyakinan yang cukup untuk berpartisipasi. Penelitian terdahulu mengenai kesadaran dan partisipasi politik pemilih pemula menunjukkan pentingnya kesadaran politik dalam menjelaskan keterlibatan warga (Jamal dkk., 2025). Namun, temuan di Desa Mekarsari mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran tetap perlu didukung oleh kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan politik secara lebih luas.

Apabila dianalisis melalui *Civic Voluntarism Model*, keterkaitan antara sosialisasi pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dapat dipahami melalui tiga komponen utama, yaitu sumber daya, keterlibatan psikologis, dan jejaring sosial

(Alscher dkk., 2026). Sosialisasi berpotensi memperkuat sumber daya berupa pengetahuan politik serta keyakinan individu terhadap pentingnya penggunaan hak pilih. Akan tetapi, keterlibatan politik juga memerlukan kesempatan berpartisipasi, dukungan lingkungan sosial, dan kepercayaan terhadap proses politik. Dalam konteks Desa Mekarsari, pengamatan informan menunjukkan bahwa sebagian warga telah memiliki pemahaman politik yang lebih baik, tetapi keterlibatan dalam forum pengambilan keputusan masih menghadapi hambatan struktural dan sosial. Temuan ini memperlihatkan keterbatasan pendekatan pendidikan politik yang hanya berorientasi pada penyampaian informasi tanpa disertai penguatan ruang partisipasi warga.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi pola yang dapat dipahami sebagai kesadaran politik yang belum diikuti oleh pemerataan partisipasi. Pola tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan politik dalam memperluas pengetahuan dan membangun sikap kritis perlu dibedakan dari keberhasilannya dalam mendorong keterlibatan warga pada berbagai ruang demokrasi. Secara konseptual, efektivitas sosialisasi dapat dipahami melalui dua dimensi, yaitu efektivitas pembentukan kesadaran (*awareness effectiveness*) dan efektivitas pemerataan kesempatan berpartisipasi (*participatory equity effectiveness*). Pembedaan ini merupakan kontribusi analitis penelitian, meskipun belum menjadi model yang teruji secara statistik. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan politik di Desa Mekarsari perlu diarahkan pada penguatan pengetahuan sekaligus perluasan ruang partisipasi, terutama bagi kelompok masyarakat yang menurut pengamatan informan masih kurang terlibat dalam kegiatan musyawarah. Pendidikan politik yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi pendidikan politik di Desa Mekarsari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, berkontribusi terhadap pembentukan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor pendukung utama meliputi relevansi materi dengan kebutuhan masyarakat, penggunaan metode partisipatif melalui diskusi dan simulasi, serta keterlibatan tokoh masyarakat yang memiliki kedekatan sosial dengan warga. Sebaliknya, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, akses informasi, dan indikasi praktik politik uang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi melibatkan kerja sama antara KPU, Bawaslu, PPK/PPS, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat dengan pembagian peran yang saling melengkapi. Namun, pelaksanaannya masih cenderung bersifat musiman dan terkonsentrasi menjelang penyelenggaraan pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pendidikan politik berkaitan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik, prosedur pemilihan, serta kemampuan mengevaluasi calon dan informasi politik secara lebih kritis. Meskipun demikian, peningkatan kesadaran tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh partisipasi yang konsisten dan merata. Keterlibatan dalam musyawarah dan forum pengambilan keputusan desa masih cenderung didominasi kelompok tertentu, sedangkan partisipasi sebagian warga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap proses politik, relevansi isu, dan kondisi sosial ekonomi.

Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pendidikan politik dalam membangun kesadaran perlu dibedakan dari efektivitasnya dalam memperluas partisipasi masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman bahwa hubungan antara sosialisasi pendidikan politik, kesadaran, dan partisipasi bersifat kontekstual serta tidak berlangsung secara otomatis. Secara praktis, diperlukan pendidikan politik yang berkelanjutan, komunikatif, dan inklusif melalui penguatan kolaborasi antarlembaga, pelibatan tokoh lokal, serta perluasan akses bagi kelompok masyarakat yang kurang terlibat. Mengingat penelitian didasarkan pada pengalaman lima informan tanpa pengukuran kuantitatif perubahan partisipasi, temuan ini perlu dipahami dalam konteks Desa Mekarsari. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan informan yang lebih beragam untuk mengkaji efektivitas sosialisasi dan kesenjangan partisipasi politik secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Afika, S. N., Darajah, A., Arrohmati, L. L., Anggraini, J. P., & Rahmanto, S. (2024). Efektivitas Sosialisasi dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publicuho*, *7*(3), 1041–1053. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.456

Alscher, P., Graf, E., & McElvany, N. (2026). Political Participation and the Civic Voluntarism Model: How Do Resources, Psychological Engagement, and Recruitment Shape Willingness to Participate during Adolescence? *Journal of Experimental Psychology: General*, *155*(1), 73–93. https://doi.org/10.1037/xge0001766

Boestam, A. B., Cangara, H., Irwanti, M., & Derivanti, A. D. (2023). Qualitative Design in Political Communication Research, Surveys and Public Opinion. *International Journal of Environmental, Sustainability and Social Science*, *4*(5), 1369–1377. https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i5.805

Hakim, L., Kolopaking, L. M., Sjaf, S., & Kinseng, R. A. (2025). Assessing Village Democracy and Welfare in Rural Indonesia: An Index-Based Correlation Analysis. *Frontiers in Political Science*, *7*. https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1622507

Haryani, T., & Hadi, S. (2021). Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat Desa Mekar Jaya. *Jurnal Sociopolitico*, *3*(2), 107–117. https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v3i2.45

Jamal, O., Rahail, J. A. L., Hadi, A. S., Tecuari, D. N., & Tjoe, R. Y. (2025). The Influence of Political Awareness on Political Participation of First-Time Voters in the 2024 General Elections (Pemilu). *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, *2*(4), 5011–5022. https://doi.org/10.62567/micjo.v2i4.1425

Khusnia, H. N., Junaidi, A., Muhlis, & Yohanes, Y. T. S. (2024). Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa. *Jurnal Karinov*, *7*(2), 126–130. https://doi.org/10.17977/um045v7i2p126

Kusmanto, H., Pardede, P. D. K., & Nasution, F. A. (2023). Digital-Based Political Education through the Election Care Village Program in Deli Serdang Regency. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *8*(2), 1293–1305. https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v8i2.13739

Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research.

International Journal of Qualitative Methods, *22*, 1–18. https://doi.org/10.1177/16094069231205789

Nuryana, R. S., Jatnika, D. C., & Firsanty, F. P. (2025). Efektivitas Sosialisasi sebagai Pendekatan Partisipatif dalam Program Sosial: Tinjauan Sistematis Literatur. *Share: Social Work Journal*, *15*(1), 35–47. https://doi.org/10.24198/share.v15i1.63487

Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511720444

Sutanto, H., Hendriawan, E., & Soleha, A. R. F. (2025). Optimalisasi Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Serentak 2024. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *4*(2), 8986–8993. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3198

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, *1*(1), 13–23. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49